

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Priyo Hari. 2006. *HUBUNGAN ANTARA PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH, BELANJA PEMBANGUNAN DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi Pada Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali)*. Simposium Nasional Akuntansi 9, Agustus 2006.
- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *PENGELOLAAN PENDAPATAN DAN ANGGARAN DAERAH*. Edisi 1. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Bastian, Indra. 2014. "Lingkup Akuntansi Sektor Publik." dalam *AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK*, 1–52. Jakarta: Erlangga.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*. Edisi VII. Semarang : Badan Penerbit – UNDIP.
- Halim, Abdul. 2013. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Harianto, David, dan Priyo Hari Adi. 2007. *HUBUNGAN ANTARA DANA ALOKASI UMUM, BELANJA MODAL, PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN PENDAPATAN PER KAPITA*. Simposium Nasional Akuntansi X, Makasar.
- Haryanto. 2008. *PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH PENDEKATAN KINERJA*. Edisi Pertama. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Jaya, I Putu Ngurah Panji Kartika dan A.A.N.B. Dwirandra. 2014. *PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA BELANJA MODAL DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI*. E- Jurnal Akuntansi, Vol. 7, No. 1 (2014):79-92.
- Kristiono, Natal. 2016. *OTONOMI DAERAH*. SEMARANG: UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.
- Kusnandar, dan Dodik Siswantoro. 2012. *Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal*. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Mardiasmo. 2009. *AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK*. Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET (Penerbit ANDI).
- Pemerintah Daerah. 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. 1999. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22

- Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. 2000. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. 2003. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Pemerintah Indonesia. 2017. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Prakosa, Kesit Bambang. 2004. *ANALISIS PENGARUH DANA ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP PREDIKSI BELANJA DAERAH (Studi Empirik Di Wilayah Propinsi Jawa Tengah Dan DIY)*. Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia, 8, 101-118.
- Sarjo, Haryadi dan Winda Julianita. 2011. *SPSS vs LISREL: Sebuah Pengantar, Aplikasi untuk Riset*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sumarmi, Saptaningsih. 2009. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi D.I.Yogyakarta*. Akmenipa UPY, Vol 4, 2009.
- Suryantini, Ni Putu Santi, Ica Rika Candraningrat, dan Ni Made Wulandari Kusumadewi. 2017. *THE INFLUENCE OF DAU (GENERAL ALLOCATION FUND) AND DAK (SPECIAL ALLOCATION FUND)*. Economics & Business Solutions Journal, Vol 1, Nomor 2, 2017.
- Wiley, John dan Sons, Inc. 2013. *Metode Penelitian untuk Bisnis*. Edisi 6. Jakarta: Salemba Empat.
- Yani, Ahmad. 2002. *Seri Keuangan Publik: HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DI INDONESIA*. Edisi 1. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.